



RENJA

2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

[0251-8318191] 

[satpolppkotabogor@gmail.com] 

[satpolpp.kotabogor.go.id] 

[0251-8318191] 

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Serta dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Bogor, April 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor



AGUSTIAN SYAH, S.STP.
NIP. 19820811 200012 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		
Gambaran Umum		1
1.1 Latar Belakang		2
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		6
1.4 Sistematika Penulisan		7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		9
2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		51
3.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR		68
BAB V PENUTUP		72

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mempunyai tugas menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib, tidak terlepas dari peran aktif koordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya sebagai Perangkat Daerah, yang mempunyai fungsi yang sama dan pelaksana teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Polisi Pamong Praja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum, dan pembinaan masyarakat dan anggota Satuan;

- b. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kota serta kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. Pelaksanaan administrasi umum Satuan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Satuan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa dalam era reformasi yang berkembang saat ini, mendesak kita bekerja secara terukur dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi sehingga fungsi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan taat azas maka perlu adanya konsistensi dalam menjalankan tugas yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan yang baik, terukur dan akuntabel telah ditetapkan RPD Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor maka RPD tersebut sebagai acuannya. Dengan demikian maka untuk melaksanakan program 1 (satu) tahun ke depan maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai rencana operasional kegiatan 2025. Rencana Kerja tersebut sebagai implementasi strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Prioritas Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 diarahkan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistematisa Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2025 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Daerah. Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai berikut :

Maksud : Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selama Tahun 2025 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Tujuan :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- 2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Oleh karena itu Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2023 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program, kegiatan dan realisasi.



**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Kota Bogor**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A	BB	A	A	100%	A	A	100%
		Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah	3.57	3.53	3.40	3.54	104%	3.50	3.50	100%
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup perangkat daerah	A	BB	A	A	100%	A	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100%	-	-	-	-	-	-
01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindak lanjuti dan Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tindak Lanjut Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibina	90%	71%	90%	71%	78%	90%	77%	85%

Penjelasan dari tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja capaian pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 di Tahun 2026.
- Kolom 5 merupakan kondisi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2022.
- Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan 2023, merupakan tahun kelima Renstra dan RPJMD periode 2019-2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan indikator kinerja Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina target 90%, realisasi 71% dengan capaian 78%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja ke satu yakni Nilai AKIP Perangkat Daerah target nilai A, realisasi A dengan capaian 100%, indikator kinerja ke dua yakni Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah dengan target nilai 3.40, realisasi 3.54 dengan capaian 104%.
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah target nilai A, realisasi A dengan capaian 100%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang perangkat daerah target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang perangkat daerah target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase BMD lingkup perangkat daerah yang berkondisi baik target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja ke satu yakni Persentase Penegakan Perda target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%, indikator kinerja ke dua yakni Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase penanganan gangguan ketentraman dan

- ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dengan indikator kinerja Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup perangkat daerah dengan target nilai 3.40, realisasi 3.54 dengan capaian 104%.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
 - Faktor penyebab tidak tercapainya target kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yakni kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
 - Faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yakni Adanya SOP dan mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yakni dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yakni dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan

penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD, secara umum capaian Rencana Kerja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan berhasil namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target, Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

2.2. ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Capaian kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri No.121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020. Dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pelanggar Perda yang ditertibkan	-	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	80,01	81	82	70,10	76,64	82	83	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	-	17	29	29	29	-	-	-	10	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		3739	3739	3739	3739	3739	3739	1049	1049	15,5	
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Penegakan PERDA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja cukup berhasil memenuhi capaian kinerja berdasarkan 2 Sasaran Renstra yaitu : *Meningkatnya kepatuhan pelanggar perda dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kawasan perkotaan* dan *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup perangkat daerah*.

Indikator sasaran renstra adalah :

1. Persentase Pelanggar Perda yang ditertibkan

Indikator Persentase Pelanggar Perda yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2023 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

2. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2023 dapat dikategorikan *belum mencapai target*, target kinerja 81 point dan realisasi 76,64 point dengan capaian 94%.

Capaian kinerja selama tahun 2023 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai Permendagri nomor 121 tahun 2018.

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2023 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 29 orang atau 100% dengan asumsi penilaian terbalik yaitu 100% sama dengan 0 (nol) orang. Sehingga capaian

SPM trantibum berdasarkan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, pada tahun 2023 realisasinya 100% dengan capaian 100% (tidak ada masyarakat Kota Bogor yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada).

Capaian kinerja selama tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja menurut Bidang urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2023 dapat dikategorikan *belum mencapai target*, target kinerja 3739 dan realisasi 1049 dengan capaian 28%.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2023 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

3. Persentase Penegakan PERDA

Indikator Persentase Penegakan PERDA dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja selama tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Permendagri Nomor 18 tahun 2020.

1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan

Indikator Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

2. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

Indikator Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

1. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Keberadaan Satpol PP Kota Bogor, sebagai entitas wilayah Kota di Propinsi Jawa Barat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan lembaga pusat dan lembaga daerah Propinsi. Sehingga untuk menghindari duplikasi program maupun tidak terakomodasi beberapa kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Rencana Kerja Satpol PP Kota Bogor perlu disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian dan Rencana Kerja Propinsi Jawa Barat. Hal ini penting sebagai upaya menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dari Rencana Kerja kedua entitas tersebut (Pusat dan Propinsi) dalam pelayanan Satpol PP di Kota Bogor.

Dimana tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, semestinya dimulai dengan kesatuan arah

dan gerak yang saling mendukung. Selanjutnya faktor pendorong terhadap pelayanan Satpol PP Kota Bogor, yaitu mengenai kesamaan penegasan terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Rencana Kerja yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam ranah kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi antara Satpol PP Kota Bogor dengan Satpol PP Propinsi Jawa Barat serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ini oleh Kementerian terkait.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sarana dan prasarana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal
			Kapasitas sumber daya anggota Satpol PP dan Sat linmas belum optimal
		Rendahnya pemahaman masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya peran serta masyarakat dan perlunya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Dampak permasalahan dan hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan tujuan dan sasaran tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor. Oleh karena itu keberhasilan implementasi tujuan dan sasaran akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam

tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi RPD Kota Bogor 2025-2026 dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut.

Memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Satpol PP untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, maka Renja Satpol PP Tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung tujuan ke-1, tujuan ke-2 dan tujuan ke-4 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Era revolusi industri 4.0 berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat, dimana pemanfaatan teknologi internet dalam berbagai hal mulai menjadi kebutuhan utama setelah sandang dan pangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tentu harus merespon revolusi industri 4.0 ini dengan sumber daya manusia yang cakap dan melek teknologi.
- b. Pembangunan ruang publik dan infrastruktur yang sangat pesat, berdampak pada meningkatnya aktifitas masyarakat pada ruang publik dan kunjungan wisatawan sehingga diperlukan pengawasan extra guna meminimalisir terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun peluang yang ada diantaranya :

- a. Peraturan perundang - undangan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkannya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.
- b. Penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang berusia relatif muda / fresh graduate diharapkan dapat membawa pada perubahan positif yang merespon era revolusi industri 4.0.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda.
- d. Terjalannya koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah yang baik .
- e. Menguatnya demokratisasi dan good governance.

5. Rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di lingkungan Kota Bogor :
 - a. Aspek regulasi yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan.
 - b. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.
 - c. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - d. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur Satpol PP.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat				49.049.918.726	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				48.177.891.926	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	28,00	45.600.090.008	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	28,00	44.818.063.208	
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26,10				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26,10		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	11,65				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	11,65		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	23,05				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	23,05		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah	100%	45.600.090.008	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah	100%	44.818.063.208	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%		
			Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah	94%				Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah	94%		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100%				Persentase Kepatuhan Anggaran	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95%	45.600.090.008	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95%	44.818.063.208	
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94%				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94%		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	90,30				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	90,30		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	85,15				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	85,15		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	90,00	45.600.090.008			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	90,00	44.818.063.208	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	93,85				Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	93,85		
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	25.000.000	
			Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100%				Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	100%	37.297.202.695	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	100%	37.297.202.695	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	37.297.202.695	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	37.297.202.695	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100%	650.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100%	0	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	650.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	734.693.767	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	602.666.967	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.824.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.824.200	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	51.429.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	51.429.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	228.313.904	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	228.313.904	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.953.363	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.953.363	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	74.146.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	74.146.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	135.026.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	135.026.800	
1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	135.026.800	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	135.026.800	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.001.778.171	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.001.778.171	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	219.875.155	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	219.875.155	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4.781.903.016	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4.781.903.016	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	1.756.388.575	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	1.756.388.575	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1.632.458.203	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1.632.458.203	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	81.630.372	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	81.630.372	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.300.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase pelanggaran perda KTR yang ditertibkan	100%	3.449.828.718	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase pelanggaran perda KTR yang ditertibkan	100%	3.359.828.718	
			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%				Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%		
			Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%				Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%		
			Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%				Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	2.071.620.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	2.071.620.000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bogor	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Doku men	30.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bogor	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Doku men	30.000.000	
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Bogor	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	289 Orang	180.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Bogor	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	289 Orang	180.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	296 Orang	150.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	296 Orang	150.000.000	
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Laporan	150.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Laporan	150.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bogor	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1.374.620.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bogor	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1.374.620.000	
7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 Laporan	37.000.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 Laporan	37.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bogor	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada	100%	1.263.208.718	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bogor	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada	100%	1.263.208.718	
1	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	78.899.600	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	78.899.600	
2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	470.632.118	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	470.632.118	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	708.677.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	708.677.000	
4	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	5.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	5.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibina	100%	115.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibina	100%	25.000.000	
1	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 Orang	90.000.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0 Orang	0	
2	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	25.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	25.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini mengenai usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan perangkat daerah kabupaten/kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten/kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan yang ditujukan langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yaitu pada saat pelaksanaan Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD .

Pada tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD .

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bogor

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai lembaga teknis operasional dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek pelaksana dan perencanaan program yang profesional mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek sosial budaya dan sumber daya pemerintahan secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya ketertiban masyarakat, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor berdasar kepada program dan kegiatan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 169 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Satpol PP untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 sesuai dengan Renstra adalah :

- a. Terwujudnya penegakkan perda dan perkara serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas;

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 adalah :

- a. Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada Perda/Perkada;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup perangkat daerah.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
1	Terwujudnya penegakkan perda dan perkada serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	3,55
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	88,75
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >100)	≥ 1 Inovasi/Tahun/PD
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	89,80

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Dalam Renja tahun 2025 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merencanakan 2 (Dua) program, 9 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah total pagu sebesar Rp. 48.177.891.926.

Dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kota Bogor kecuali untuk sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang outputnya yaitu pelaksanaan HUT Satpol PP Tingkat Nasional maupun Propinsi, rapat koordinasi dan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Berikut disajikan pada tabel 3.2 rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagai berikut :



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat				48.177.891.926	APBD Kota Bogor			50.909.000.000
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja		28,00	44.818.063.208	APBD Kota Bogor		28,20	47.327.000.000
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja		26,10				26,15	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja		11,65				11,75	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal		23,05				23,15	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bogor	100%	44.818.063.208	APBD Kota Bogor		100%	47.327.000.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100%				100%	
		Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah		94%				94%	
		Persentase Kepatuhan Anggaran		100%				100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Kota Bogor	95%	44.818.063.208	APBD Kota Bogor		95%	47.327.000.000
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		94%				94%	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		90,30				90,35	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		85,15				85,25	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan		90,00				90,10	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		93,85				93,95	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	Kota Bogor	100%	25.000.000	APBD Kota Bogor		100%	25.000.000
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah		100%				100%	
2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	3 Dokumen	10.000.000	APBD Kota Bogor		3 Dokumen	10.000.000
2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	6 Laporan	15.000.000	APBD Kota Bogor		6 Laporan	15.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	Kota Bogor	100%	37.297.202.695	APBD Kota Bogor		100%	38.500.000.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100%				100%	
2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	185 Orang/ Bulan	37.297.202.695	APBD Kota Bogor		180 Orang/ Bulan	38.500.000.000
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Kota Bogor	100%	0	APBD Kota Bogor		100%	650.000.000
2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bogor	0 Paket	0	APBD Kota Bogor		1 Paket	650.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Kota Bogor	100%	602.666.967	APBD Kota Bogor		100%	637.000.000
2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	162.824.200	APBD Kota Bogor		1 Paket	170.000.000
2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	51.429.500	APBD Kota Bogor		1 Paket	55.000.000
2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	45.000.000	APBD Kota Bogor		1 Paket	55.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	228.313.904	APBD Kota Bogor		1 Paket	230.000.000
2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Dokumen	40.953.363	APBD Kota Bogor		1 Paket	42.000.000
2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	74.146.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	85.000.000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	135.026.800	APBD Kota Bogor		100%	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	8 Unit	135.026.800	APBD Kota Bogor		5 Unit	100.000.000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bogor	100%	5.001.778.171	APBD Kota Bogor		100%	5.530.000.000
2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1 Laporan	219.875.155	APBD Kota Bogor		1 Laporan	230.000.000
2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Laporan	4.781.903.016	APBD Kota Bogor		1 Laporan	5.300.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Kota Bogor	100%	1.756.388.575	APBD Kota Bogor		100%	1.885.000.000
2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bogor	65 Unit	1.632.458.203	APBD Kota Bogor		65 Unit	1.750.000.000
2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	85 Unit	81.630.372	APBD Kota Bogor		93 Unit	90.000.000
2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	42.300.000	APBD Kota Bogor		1 Unit	45.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan	Kota Bogor	100%	3.359.828.718	APBD Kota Bogor		100%	3.582.000.000
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Kota Bogor	100%		APBD Kota Bogor		100%	
		Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	Kota Bogor	100%		APBD Kota Bogor		100%	
		Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Bogor	100%		APBD Kota Bogor		100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	Kota Bogor	100%	2.071.620.000	APBD Kota Bogor		100%	2.277.000.000
2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	APBD Kota Bogor		1 Dokumen	150.000.000
2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bogor	1 Dokumen	30.000.000	APBD Kota Bogor		1 Dokumen	50.000.000
2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Bogor	289 Orang	180.000.000	APBD Kota Bogor		289 Orang	180.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bogor	296 Orang	150.000.000	APBD Kota Bogor		296 Orang	150.000.000
2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bogor	1 Laporan	150.000.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	210.000.000
2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Bogor	1 Laporan	1.374.620.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	1.500.000.000
2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Kota Bogor	1 Laporan	37.000.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	37.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada	Kota Bogor	100%	1.263.208.718	APBD Kota Bogor		100%	1.280.000.000
2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kota Bogor	1 Laporan	78.899.600	APBD Kota Bogor		1 Laporan	80.000.000
2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	1 Laporan	470.632.118	APBD Kota Bogor		1 Laporan	475.000.000
2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Bogor	1 Laporan	708.677.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	720.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	1 Laporan	5.000.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	5.000.000
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibina	Kota Bogor	100%	25.000.000	APBD Kota Bogor		100%	25.000.000
2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Bogor	1 Laporan	25.000.000	APBD Kota Bogor		1 Laporan	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan sasaran perangkat daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 : Program dan Kegiatan utama dalam mendukung pemenuhan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah daerah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
- 5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

B. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 1) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- 2) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Bogor, April 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor



AGUSTIAN SYAH, S.STP.
NIP. 19820811 200012 1 001